



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
UNIT KERJA : KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN MODERASI BERAGAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **WARSITO**
2. Jabatan : **DEPUTI**
3. NHK : **682953**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 3.421.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 475 m2/225 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 1.305.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 603.000.000
3. Tanah Seluas 15000 m2 di KAB / KOTA TANGGAMUS, HASIL SENDIRI Rp. 163.000.000
4. Tanah Seluas 4500 m2 di KAB / KOTA PESAWARAN, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
5. Tanah Seluas 298 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 295.000.000
6. Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
7. Tanah Seluas 700 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/125 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 169.400.000**

1. MOTOR, YAMAHA VEGA R SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000



2. MOBIL, NISSAN MARCH MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 105.000.000
3. MOTOR, VESPA SPRINT 150CC Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
40.000.000
4. MOTOR, BENILLI 200CC Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
23.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	20.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	100.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.037.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.747.400.000
III. HUTANG	Rp.	60.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.687.400.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.